



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARYANTA
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 155574

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 4.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 292 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/50 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 326 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 4.000.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 492.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 552.120.587

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.748.120.587

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.748.120.587

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.